



PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH**





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Jln. Balai Polam No.2 Kel. Tanjung Gadang. Telp. 0752-92790 Payakumbuh

KEPUTUSAN
KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : /DP3AP2KB/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 065/29/WK-Pyk/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-Perangkat Daerah) Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;

12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 56);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal :Agustus 2019
KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
NIP. 19610903 198703 1 003

Tembusan :disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh;
2. Sdr.Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 dapat selesai dikerjakan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh untuk mencapai Visi dan Misi dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan terbaik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019 melalui Perubahan APBD Kota Payakumbuh. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disusun oleh Tim yang terdiri unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekeliruan atau kekurangan, untuk itu masukan yang membangun demi perbaikan Renja ini untuk masa yang akan datang sangat diharapkan.

Demikianlah penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, yang telah membantu hingga tersusunnya Perubahan Renja ini, semoga ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh di masa datang.

Payakumbuh, Agustus 2019

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Kota Payakumbuh**

KEPALA



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
NIP. 19610903 198703 1 003

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2017	5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja	14
3.2 Penjelasan Perubahan Renja	15
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2019 Di Kota Payakumbuh
Tabel 2	Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Tabel 3	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Per-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 (dari SIPPD)
Tabel 4	Rekap DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 (dari SIPKD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh, maka dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan menjadi pilar utama pelayanan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sangat erat kaitannya dengan Dokumen Rencana Strategis SKPD dan dijabarkan dalam Perencanaan SKPD untuk siklus periode 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan DP3A&P2KB Kota Payakumbuh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah secara sistematis yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 yang sedang berjalan sampai dengan Bulan Juni 2017, Peningkatan pelayanan SKPD dan target pencapaian kinerja hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A&P2KB Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 -2017 (Lembaga Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 56);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 59);
12. Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 065/29/SE-WK-pyk/2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2019.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2019 yang berikutnya sebagai dasar penetapan APBD di sisa tahun berjalan.

2. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Hasil yang hendak dicapai dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Menjadi acuan bagi SKPD untuk membuat program dan kegiatan dalam periode sisa tahun berjalan.
2. Tersedianya pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan.
3. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Sasaran, Tujuan dan Hasil yang hendak dicapai pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan
4. Menetapkan perubahan tujuan dan hasil yang hendak dicapai pada Rencana Kerja Tahun berjalan.

Dasar Pertimbangan Perubahan

Dalam usulan Perubahan APBD 2019, diusulkan penambahan anggaran pada 1 (satu) dari 13(tiga belas) kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja. Jumlah penambahan yang diusulkan dalam Perubahan Renja TA. 2019 ini adalah sebesar **Rp. 74.860.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**

Dasar pertimbangan perubahan anggaran dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Upah Minimum Propinsi (UMP).
2. Penambahan belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
3. Kenaikan tarif dasar rekening telepon, air dan listrik di awal Tahun 2019 ini. Perbaikan instalasi listrik gedung kantor.
4. Penyesuaian belanja pakaian dinas.
5. Penambahan Kebutuhan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Penyesuaian belanja kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
7. Penyesuaian kebutuhan kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan di daerah.
8. Penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
9. Penambahan dana kegiatan Pemberdayaan Gerakan PKK.
10. Penyesuaian terhadap kebutuhan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
11. Penyesuaian kebutuhan kegiatan penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

12. Penyesuaian kebutuhan terhadap kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak..
13. Penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2019

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja

3.2 Penjelasan Perubahan Renja

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2019

Secara umum pelaksanaan Realisasi Anggaran OPD DP3A&P2KB tahun 2019 yang melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib pada umumnya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dari 35 kegiatan dengan total **anggaran sebelum Perubahan APBD 2019 sebesar Rp. 8.709.136.615,- sudah terealisasi sebesar Rp. 2.092.098.753,- atau 24,02%**. Adapun Program Dan Kegiatan serta rincian pelaksanaan kegiatan hingga Bulan Mei tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung dengan Anggaran Sebelum Perubahan APBD sebesar : Rp. 2.905.166.075,- hingga Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp. 1.133.062.377,- atau 39%.
2. Belanja Langsung dengan Anggaran Sebelum Perubahan APBD sebesar : Rp. 5.803.970.540,- hingga Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp. 959.036.376,- atau 16,52 % dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Sekretariat terdiri dari 4 (empat) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan alokasi Dana sebesar Rp.1.148.241.820.- hingga Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp. 351.104.586.- atau 30.58%
 - 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 4 (Empat) Program dengan 5 (Lima) kegiatan, alokasi dana sebesar Rp.981.895.900.- hingga Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp. 180.070.100.- atau 18.34%
 - 3) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari 2 (dua) Program dengan 3 (tiga) kegiatan, alokasi dana sebesar Rp. 85.930.120.- Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp. 16.826.690.- atau 19.58%
 - 4) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana terdiri dari 4 (empat) Program dengan 8 (Delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.587.902.700.- Bulan Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp.412.435.000,- atau 11.50%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019 ini, tidak ditemukan kendala atau permasalahan yang berarti, hanya saja ada beberapa kegiatan yang posisi anggaran kas nya lebih banyak di Semester Kedua TA.2019 sehingga kegiatan belum dilaksanakan hingga Bulan Mei Tahun 2019.

Adapun Rincian Kegiatan OPD DP3A&P2KB dapat dilihat dalam **Lampiran 1** Evaluasi Hasil Renja SKPD BPMP & KB sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 pada kolom **(8), (9) dan (12)**.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja

Rencana Program dan Kegiatan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Visi dan Misi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana maupun Visi dan Misi Kepala Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan Masyarakat melalui partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan Kota Payakumbuh.

Secara umum pelaksanaan Renja OPD DP3A&P2KB tahun 2019 yang melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib hingga triwulan II bulan Mei TA.2019 telah mencapai realisasi keuangan belanja daerah sebesar 24,02%, dengan rincian belanja langsung terealisasi sebesar 16,52 % dari jumlah anggaran 5.803.970.540,-. Namun karena terjadinya beberapa perubahan kebutuhan pendanaan yang disebabkan oleh kenaikan harga dan tarif, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja).

Pada Rencana Perubahan Renja OPD DP3A&P2KB TA. 2019 ini, terdapat usulan perubahan sebanyak 13 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 36.000.000,- menjadi Rp. 77.800.000,- (dalam Perubahan Renja bertambah Rp.41.800.000,-)
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 10.500.000,- menjadi Rp. 12.740.000,- (dalam Perubahan Renja bertambah Rp. 2.240.000,-)
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebelum perubahan tidak ada, menjadi Rp. 21.079.872,- (dalam Perubahan Renja bertambah Rp. 21.079.872,-)
4. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 237.782.040,- menjadi Rp. 281.959.668,- (dalam Perubahan Renja bertambah Rp. 44.177.628,-)

5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 24.300.000,- menjadi Rp. 22.275.000,- (dalam Perubahan Renja berkurang Rp. 2.025.000,-)
6. Pemberdayaan Gerakan PKK dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 480.159.300,- menjadi Rp. 555.019.300,- (dalam Perubahan Renja bertambah Rp. 74.860.000,-)
7. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 30.742.500,- menjadi Rp. 30.742.500,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
8. Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 62.122.500,- menjadi Rp. 62.122.500,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
9. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 18.143.500,- menjadi Rp. 18.143.500,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
10. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 378.651.100,- menjadi Rp. 378.651.100,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
11. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 45.075.100,- menjadi Rp. 45.075.100,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
12. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 334.537.100,- menjadi Rp. 334.537.100,- (dalam Perubahan Renja tidak menambah anggaran)
13. Fasilitasi Penyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 703.555.000,- menjadi Rp. 596.282.500,- (dalam Perubahan Renja berkurang Rp. 107.272.500,-)

3.2 Penjelasan Perubahan Renja

Selanjutnya dari 13 kegiatan yang diusulkan dalam anggaran perubahan, maka secara keseluruhan anggaran DP3A&P2KB TA.2019 dari yang awalnya sebesar Rp. 5.803.970.540,- bertambah menjadi Rp. 5.878.830.540,- , atau bertambah sebesar **Rp.74.860.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**

Hal-hal yang dapat dijelaskan dalam usulan perubahan Renja DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA. 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Upah Minimum Propinsi (UMP) di Kota Payakumbuh sehingga perlu penyesuaian besaran honor bulanan Tenaga Harian Lepas (THL) dari yang sebelumnya dibayarkan berdasarkan UMP Propinsi Sumatera Barat menjadi Rp. 2.289.228,- per bulan.
2. Kurangnya alokasi dana untuk pembayaran rekening listrik yang disebabkan kenaikan tarif dasar rekeningtersebut diatas. Sehingga diprediksi alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir Tahun Anggaran 2019 ini. Untuk perbaikan instalasi listrik kantor yang tidak memadai.
3. Penambahan anggaran dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor.
4. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Evaluasi PKK Tahun 2019 dan biaya perjalanan dinas;
5. Pengurangan anggaran PMT-AS.
6. Adanya beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, namun tidak merubah jumlah anggaran kegiatan.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja DP3A&P2KB Tahun 2019 berikut ini.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA (DP3A&P2KB)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju 2020			Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							APBD				DP3AP2KB
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan						APBD				
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif	peserta	15 orang	18.143.500	18.143.500	-				a	
		Jenis rangkaian kegiatan hari ibu	kegiatan	2								
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan						APBD				
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	organisasi	3 organisasi	378.651.100	378.651.100	-				a	
	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif						APBD				
	Advokasi dan Sosialisasi Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik hukum dan sosial	peserta	100	12.077.000	12.077.000	-				a	

	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							APBD			a	
	Pemberdayaan gerakan PKK	Jumlah PKK aktif	PKK	54	480.159.300	555.019.300	74.860.000				a	
	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG	peserta	64	30.742.500	30.742.500	-				a	
Meningkatkan implementasi Kota Layak Anak (KLA)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah pencapaian skor 24 indikator Kota Layak Anak						APBD				
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kota Layak Anak	peserta	65	42.931.120	42.931.120					a	
	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Sistem informasi gender dan anak	buku	1	4.799.000	4.799.000					a	
	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak						APBD				
	Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak		peserta	60	38.200.000	38.200.000					a	
Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan						APBD				
		Persentase penanganan kasus kekerasan anak										
	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	korban kekerasan	100	62.122.500	62.122.500	-				a	

	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan		-	-	-		APBD				
		Persentase penanganan kasus kekerasan anak										
Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA							APBD				DP3AP2KB
	Program Keluarga Berencana	Menurunnya Unmet need						APBD				
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Meningkatkan pelayanan KB dan Alkont	alkont	63,87,	45.075.100	45.075.100						a
	Pembinaan Keluarga Berencana	Pembinaan KB kepada calon akseptor KB oleh kader KB	kader KB									a
		Jumlah pembayaran honor Kader KB		280 org	235.402.000	235.402.000						
	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya	paket pengadaan	4 paket	938.927.000	938.927.000						a
	Peningkatan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat dukungan operasional	balai penyuluhan	5 balai Penyuluhan	1.281.008.000	1.281.008.000						a
	Pengembangan model parameter kependudukan	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun	buku	1	26.205.000	26.205.000						a
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga						APBD				

	Pelayanan Konseling KB	Jumlah petugas klinik KB yang dibayarkan honor konseling KB kepada calon akseptor KB	petugas klinik	39 klinik	23.193.500	23.193.500					a	
Meningkatkan ketahanan keluarga	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga						APBD				
	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah pembayaran honor kader BKB	kader BKB	380 org	334.537.100	334.537.100	-				a	
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase Posyandu dengan strata mandiri										
		Menurunnya persentase sekolah penerima PMT-AS untuk mengukur kemandirian sekolah						APBD				
	Fasilitasi Penyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu	Pembayaran honor kader Posyandu	Kader Posyandu	660 orang							a	
		Jumlah sekolah penerima PMT-AS				703.555.000	596.282.500	- 107.272.500				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas P3A&P 2KB Kota Payakumbuh	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						APBD				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli		296	1.651.000	1.651.000					a	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan		3 rekening	36.000.000	77.800.000	41.800.000				a	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya		51 unit	10.500.000	12.740.000	2.240.000				a	

Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya dan pengelola barang milik daerah		38 orang	229.787.000	229.787.000					a	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli		24 jenis	7.515.000	7.515.000					a	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		17 unit	6.000.000	6.000.000					a	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		39 jenis	17.764.000	17.764.000					a	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan dijilid		8 jenis; 44.350 lembar; 60 buku	13.096.450	13.096.450					a	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		7 jenis	2.875.000	2.875.000					a	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan & perlengkapan kantor		-	-	21.079.872	21.079.872				a	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		2 media cetak	3.821.550	3.821.550					a	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang membutuhkan makanan dan snack		681 porsi	8.857.500	8.857.500					a	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan		91	209.380.000	209.380.000					a	
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab		1 Gedung	180.000.000	180.000.000					a	
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honorinya		10 orang; 12 bulan	237.782.040	281.959.668	44.177.628				a	

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana & parasana kerja						APBD				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan empat		51 unit	156.170.500	156.170.500					a	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin ASN						APBD				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan		54 stel	24.300.000	22.275.000	- 2.025.000				a	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SKPD	Meningkatnya SDM ASN						APBD				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja & perencanaan						APBD				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen-dokumen laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja		2 dok	2.741.780	2.741.780					a	
Jumlah					5.803.970.540	5.878.830.540	74.860.000					

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A&P2KB Kota Payakumbuh ini merupakan usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang mengalami perubahan kegiatan, penyesuaian kode rekening dan penambahan anggaran. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja DP3A&P2KB Kota Payakumbuh dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di OPD DP3A&P2KB selama Tahun 2019 antara lain :

1. Terbatasnya alokasi anggaran APBD dalam menunjang Operasional pelaksanaan Program Dan Kegiatan untuk menunjang 2 (dua) urusan wajib yang harus dijalankan oleh DP3A&P2KB .
2. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi baik secara kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan oleh OPD.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang operasional di kantor maupun Petugas Lapangan .
4. Beberapa kegiatan yang posisi anggaran kas nya lebih banyak di Semester Kedua TA.2019 sehingga kegiatan belum dilaksanakan hingga Bulan Juni Tahun 2019.

Dalam rangka menindaklanjuti beberapa kendala tersebut :

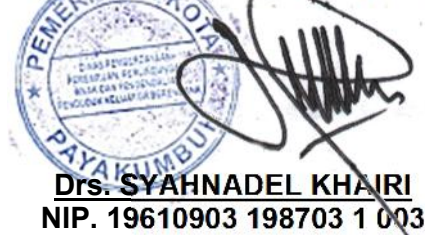
- 1) Diperlukan penambahan Anggaran atau pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja , serta telaahan Staf yang diusulkan oleh DP3A&P2KB Kota Payakumbuh Tahun 2019.
- 2) Untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah Kota Payakumbuh khususnya yang terkait dengan DP3A&P2KB dalam hal mewujudkan peningkatan layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, diperlukan SDM yang memiliki Kompetensi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan DP3A&P2KB.

- 3) Untuk Peningkatan Penunjang Pelayanan, diperlukan Sarana dan Prasarana yang memadai di Lingkungan DP3A&P2KB Kota Payakumbuh yang digunakan untuk kelancaran dan aktifitas perkantoran sehingga akan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas kerja yang bermuara kepada peningkatan Kinerja OPD DP3A&P2KB Kota Payakumbuh.

Dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan DP3A&P2KB Kota Payakumbuh dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, bertahap, dan berkesinambungan sehingga dapat menampung dan melayani seluruh aspirasi masyarakat. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Agustus 2019

Kepala DP3A&P2KB Kota Payakumbuh



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
NIP. 19610903 198703 1 003

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA (DP3A&P2KB)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan Output	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluruhan kegiatan Sampai Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Renja tahun 2019 (tahun n)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran yang Dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10=(8/6)	11=(9/7)			
1	2	3	4		5		6	7	8		9	10=(8/6)	11=(9/7)	12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
A	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK														
I	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan													
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif	120	464.586.583	60	99.034.447	15 orang	87.709.000	-	397.000	-	0.005	60	50	
		Jenis rangkaian kegiatan hari ibu					2								
II	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan													
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	147	1.532.612.000	11	729.670.093	3 organisasi	368.163.000	-	60.542.300	-	0.164	11	7	
III	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif													
1	Peningkatan peran perempuan di bidang politik dan lembaga legislatif	Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Payakumbuh	100	121.667.000	210	85.686.170	100	30.215.000	-	-	-	-	210	210	
	Advokasi dan Sosialisasi Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik hukum dan sosial	100	121.667.000	-	-	100	12.077.000		5.612.800	-	-	-	-	

IV	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak													
	Pemberdayaan gerakan PKK	Jumlah PKK aktif	270	2.533.806.335	108	464.934.087	54	471.826.800	-	103.759.600	-		108	40
	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG	120	127.709.000	-	-	64	30.742.500		7.138.400	-		-	-
V	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah pencapaian skor 24 indikator Kota Layak Anak												
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kota Layak Anak	65	198.576.875	145	87.912.786	65	35.813.620	-	3.225.120	-		145	223
2	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak	40	12.495.000										
3	Penyusunan data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Sistem informasi gender dan anak	5	236.949.635	1	6.823.350	1	12.495.000	-	3.182.750	-		1	20
III	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak												
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta kegiatan Forum Anak	-	-	100	62.491.780	-	-	-				100	-
2	Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak		120	179.683.713	60	57.852.644	60	58.600.000	-	10.418.820	-		-	-
IV	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan												
		Persentase penanganan kasus kekerasan anak												
1	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	570.452.973	100	104.317.120	100	82.557.000	-	2.620.000	-		100	-

I	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penanganan kasus kekerasan anak											
1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA												
I	Program Keluarga Berencana	Menurunnya Un-meet need											
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Meningkatkan pelayanan KB dan Alkont	67	363.046.000	13	95.881.425	63.87.	56.740.000	-	922.600	-	13	-
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Pembinaan KB kepada calon akseptor KB oleh kader KB	12	1.375.519.500	280	509.823.800	280 org	237.102.000	-	59.002.000	-	280	100
		Jumlah pembayaran honor Kader KB	280										
3	Peningkatan sarana dan prasana keluarga Berencana	Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya	30 Paket	5.267.441.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya	30 Paket	5.564.746.679	10	2.143.443.940	4 paket	1.269.630.769	-	-	-	10	33%
5	Peningkatan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat dukungan operasional	5 balai	5.500.824.010	5 balai	1.178.579.819	5 balai Penyuluhan	1.208.150.000	-	80.763.700	-	5	17%
6	Pengembangan model parameter kependudukan	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun	4	200.000.000	-	-	1	26.205.000		1.203.550	-		

II	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga													-
1	Pelayanan Konseling KB	Jumlah petugas klinik KB yang dibayarkan honor konseling KB kepada calon akseptor KB	41	440.895.000	39	28.102.200	39 klinik	23.193.500	-	331.000	-		39		-
II	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga													
1	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah pembayaran honor kader BKB	380	1.634.545.733	380	711.238.420	380 org	340.149.100	-	80.202.600	-		-		-
III	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga	-	-	-	-		-	-	-			-		-
1	Orientasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Pelaksanaan jambore Saka Kencana	-	-	-	-		-							
V	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase Posyandu dengan strata mandiri													
		Menurunnya persentase sekolah penerima PMT-AS untuk mengukur kemandirian sekolah													
1	Fasilitasi Penyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu	Pembayaran honor kader Posyandu	660	5.055.509.100	660	1.442.580.840	660 orang	802.609.100	-	190.009.550			660	100	
		Jumlah sekolah penerima PMT-AS	15		28		-								28
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran													
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli	2530	7.908.050	511	2.867.000	296	1.651.000	286	1.161.000	97		797	31.501.98	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	15	229.912.889	6	80.947.735	3 rekening	36.000.000	-	13.329.009	-		-	-	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	255	50.293.444	80	16.570.500	51	10.500.000	10	-	20		90	35.	

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya dan pengelola barang milik daerah	70	773.911.144	28	231.078.100	38	229.787.000	-	70.850.000	-	28	40
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	110	35.995.737	46	14.994.000	24	7.515.000	12	5.635.000	50	28	25
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	85	28.739.111	34	11.485.000	17	6.000.000	1	2.000.000	6	35	41
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	225	97.047.188	90	42.801.250	39	17.764.000	29	13.294.500	74	119	53
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan dijilid	40 jenis; 135000 lembar;300 buku;	62.745.862	6	12.895.250	8 jenis; 44.350 lembar; 60 buku	13.096.450	-	1.426.000	-	6	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	35	13.770.824	15	5.728.750	7	2.875.000	4	1.433.000	57	19	54
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	50	35.923.889	3	21.750.000	-	-	-	-	-	3	6
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10	18.304.658	2	6.180.000	2 media cetak	3.821.550	-	1.160.000	-	2	20
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang membutuhkan makanan dan snack	3405	42.426.113	12	7.951.900	681 porsi	8.857.500	-	2.904.000	-	12	0
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	455	579.818.935	12	154.085.408	91	209.380.000	-	79.784.183	-	12	3
14	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeuler yang dibutuhkan	10	82.039.255	2	9.900.000	-	-	-	-	-	2	20
15	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	5	89.039.132	1	9.648.100	1 Gedung	180.000.000	-	-	-	1	20
16	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honorinya	50	1.293.477.346	16	404.042.808	10 orang; 12 bulan	269.590.248	-	93.492.076	-	16	32
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana & parasana kerja		-						-	-	-	

1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan empat	255	1.498.617.965	102	345.978.212	51	156.170.500	10	40.683.318	20	112	44
	Pengadaan Kendaraan Dinas/opersional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan		250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin ASN		-						-		-	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	275	157.895.520	104	49.269.000	54	24.300.000	54	22.275.000	100	158	57
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SKPD	Meningkatnya SDM ASN		-						-		-	-
1	Penilaian Angka Kredit	Jumlah penyuluh lapangan yang dinilai angka kredit dan tim penilai	70	-	12	3.900.000	-	-	-	-	-	12	17.142.86
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja & perencanaan		-						-		-	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen-dokumen laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja	10	87.415.323	4	13.111.130	2	2.741.780	2	1.677.500	100	6	60
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan & pelayanan publik	10	100.148.749	4	12.281.655	2	-	2	-	100	6	60
3	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengendalian & evaluasi pelaksanaan program	10	126.325.981	4	34.988.750	2 dok	-	-	-	-	4	40
Jumlah				37.164.491.051		9.300.827.469		6.334.028.417		960.436.376			

KEPALA



DRS SYAHNADEL KHAIRI
NIP.19610903 198703 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	98,52%
	Indeks Pemberdayaan Gender	61,80%
	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya
Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	0.074%
	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0.052%
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	70%
Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Rasio Penggunaan Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalency Ratio (CPR)	76,9%
Meningkatkan cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	80%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Hasil penilaian AKIP oleh inspektorat	A

Payakumbuh, Desember 2018


KEPALA
RS SYANNADEL KHAIRI
NIP.19610903 198703 1 003